

## Titik Nadir Demokrasi Pasca Reformasi: Quo Vadis *Civil Society*

Mukhamad Shokheh<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: [shokheh@mail.unnes.ac.id](mailto:shokheh@mail.unnes.ac.id)\*

\*Korespondensi

### Abstrak

Tantangan pasca reformasi tahun 1998 adalah terbentuknya masyarakat demokratis yang memiliki kemandirian dalam bidang politik dan ekonomi. Demokrasi tidak bisa diwujudkan dalam suasana penuh ketergantungan, untuk itu perlu dilibatkan seluruh elemen dalam meningkatkan kapasitasnya sebagai warga negara. Artikel ini menganalisis kehidupan demokrasi pasca reformasi dan upaya membentuk masyarakat demokratis pasca otoritarianisme. Temuan penelitian penting menunjukkan bahwa perbaikan kehidupan demokrasi perlu dimulai oleh seluruh elemen. Dorongan untuk menciptakan gerakan *civil society* untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan merupakan tanda bahwa kehidupan demokrasi masih perlu terus dikembangkan, padahal dalam beberapa tahun terakhir, berbagai tantangan terhadap demokrasi telah menimbulkan kemunduran. Nuansa represi merupakan ciri yang cukup terlihat, untuk itu untuk mengontrol peran penguasa diperlukan *civil society*, melalui gerakan masyarakat yang memiliki kesadaran politik dan sosial akan melahirkan kualitas demokrasi yang lebih baik. Kesimpulan artikel ini menekankan perlunya agenda reformasi budaya politik mulai dari elemen penguasa hingga lapisan masyarakat bawah untuk menciptakan kelancaran proses demokratisasi dan mengungkap sifat-sifat otoritatif serta perlunya mengedepankan sifat-sifat humanis dalam diri bangsa.

**Kata Kunci:** *civil society*; demokrasi; otoritarianisme; reformasi

### Abstract

The challenge after the 1998 reforms is the formation of a democratic society that has independence in the political and economic fields. Democracy cannot be realized in an atmosphere full of dependency, for this reason, all elements need to be involved in increasing their capacity as nation citizens. This article analyzes post-reform democratic life and efforts to form a democratic society after authoritarianism. Important research findings show that improving democratic life needs to be initiated by all elements. The encouragement to create a civil society movement to be involved in various areas of life is a sign that democratic life still needs to continue to be developed, whereas, in recent years, various challenges to democracy have given rise to a setback. , the nuances of repression are a characteristic that is quite visible, for this reason, to control the role of the authorities, civil society is needed, through community movements that have political and social awareness will give birth to a better quality of democracy. The conclusion of this article emphasizes the need for a political culture reform agenda from the ruling elements to the lower levels of society to create a smooth democratization process and reveal authoritative qualities and the need to prioritize humanist qualities in the nation.

**Keywords:** authoritarianism; civil society; democracy; reform



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Pendahuluan

Demokrasi dan masyarakat sipil (*civil society*) bagaikan dua sisi mata uang, keduanya bersifat ko-eksistensi. Dengan *civil society* yang kuat, demokrasi akan berjalan dengan baik (Putnam, 1993). Dan dalam suasana negara yang demokratis, *civil society* akan berkembang dan tumbuh dengan kuat pula. Nurcholish Madjid (1999) membuat metafor yang cukup menarik, *civil society* adalah “rumah” persemaian demokrasi. Jadi demokrasi tidak hanya tercermin dalam pemilu yang bebas dan demokratis, tetapi juga diperlukan persemaian dalam “rumah”, yaitu *civil society*.

Larry Diamond (1994) mengatakan bahwa *civil society* memberikan kontribusi yang cukup besar bagi tumbuhnya demokrasi. *Pertama*, *civil society* menyediakan wahana sumber daya politik, ekonomi, kebudayaan dan moral untuk menjaga dan mengawasi keseimbangan negara. Asosiasi independen dan media yang bebas memberikan dasar bagi pembatasan kekuasaan negara melalui kontrol publik. *Kedua*, beragam dan pluralnya dalam masyarakat sipil dengan berbagai kepentingannya, bila diorganisasi dan dikelola dengan baik, maka hal ini dapat menjadi dasar yang penting bagi persaingan yang demokratis. *Ketiga*, akan memperkaya peranan partai-partai politik dalam hal partisipasi politik, meningkatkan efektivitas politik dan meningkatkan kesadaran kewarganegaraan (*citizenship*). *Keempat*, ikut menjaga stabilitas negara. Dalam arti bahwa *civil society*, karena kemandiriannya terhadap negara, mampu menjaga independensinya yang berarti secara diam-diam mengurangi peran negara. *Kelima*, sebagai wadah bagi seleksi dan lahirnya para pemimpin politik yang baru. *Keenam*, menghalangi dominasi rezim otoriter.

Dalam konteks penumbuhan elemen-elemen demokrasi, partisipasi aktif dari *civil society* menjadi komponen dasar demokrasi. Hal ini berarti perlu mengembalikan hak-hak rakyat sebagai stakeholders di dalam pengambilan keputusan sehingga menunjukkan keterkaitan antara demokrasi, otonomi, dan partisipasi. Selanjutnya, hal ini akan mendorong bagi terbentuknya pemerintahan yang demokratis.

Pemerintahan demokratis adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Pemerintahan demokratis bergantung pada seberapa besar keterlibatan politik (*civic engagement*) warganya. Ada proses pelibatan masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintahan. Kekuatan politik menyebar dalam masyarakat dan politik nasional merupakan hasil pertarungan di masyarakat. Keterlibatan warga negara dalam asosiasi-asosiasi yang potensial menumbuhkan sikap terbuka, trust, toleransi dan sikap positif lainnya kemudian menjadi penting dalam bangunan politik nasional (Putnam, 1993).

Konsolidasi demokrasi melalui masyarakat sipil merupakan sebuah tema yang sangat populer dalam konteks wacana dan gerakan demokratisasi. Pada akhir abad ke-20 demokrasi telah diterapkan di hampir semua negara di dunia. Pilihan terhadap demokrasi ini, setidaknya didasari oleh tiga landasan pemikiran.

*Pertama*, demokrasi diyakini sebagai model pemerintahan relevan dan doktrin politik yang memberikan kemanfaatan bagi kebanyakan negara. *Kedua*, sebagai sistem politik dan pemerintah dianggap memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak zaman Yunani Kuno. Secara historis demokrasi telah teruji, tahan banting dan mampu menjamin stabilitas suatu negara. *Ketiga*, demokrasi dipandang sebagai sistem yang alamiah dan manusiawi sehingga rakyat dan negara manapun akan memilih demokrasi bila diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya.

Aktivisme Civil Society dalam penguatan demokrasi pada dekade terakhir abad ke-20 dapat dihubungkan dengan gelombang ketiga demokratisasi (Huntington, 1991, p. 13) yang terjadi di wilayah Amerika Latin, Eropa Selatan dan Eropa Timur. Laporan Surya Kusuma tentang penelitian World Value Survey (WVS) yang dilakukan sepanjang tahun 1995-1996 dan 2000-2002 mengungkapkan bahwa dunia melihat citrademokrasi secara positif. Dalam dekade terakhir ini, demokrasi menjadi model politik yang pengaruhnya menjangkau secara global tanpa memandang perbedaan budaya.

Demokratisasi di Indonesia tumbuh dan berkembang di lingkupi oleh faktor sejarah, sosial dan ekonomi. Pasca pemerintahan Presiden Soeharto yang telah berkuasakurang lebih 32 tahun, politik Indonesia sedang memasuki era transisi menuju demokrasi. Era transisi ini mengandung pengertian bahwa telah terjadi peralihan dari suatu rezim yang berkuasa dengan sistem dan cara otoritarianisme menuju suatu tatanan kehidupan kenegaraan yang mencerminkan nilai dan prinsip-prinsip demokrasi. Jatuhnya pemerintahan Soeharto, kemudian digantikan oleh wakil presiden Habibie sebagai presiden yang berlangsung sangat singkat kemudian digantikan oleh presiden Abdurrahman Wahid yang terpilih secara konstitusional dan demokratis.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Akar Sejarah Masyarakat Sipil dan gagasan Demokratisasi di Indonesia**

Secara historis kelembagaan *civil society* di Indonesia telah muncul ketika proses transformasi akibat modernisasi terjadi dan menghasilkan pembentukan sosial baru yang berbeda dengan masyarakat tradisional. Akar *civil society* di Indonesia dapat dirunut secara historis sejak terjadinya perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial, utamanya ketika kapitalisme merkantilis mulai diperkenalkan oleh Belanda. Ia telah ikut mendorong terjadinya pembentukan sosial lewat proses industrialisasi, urbanisasi dan pendidikan modern. Hasilnya, antara lain, munculnya kesadaran baru di kalangan kaum elite pribumi yang kemudian mendorong terbentuknya organisasi-organisasi sosial modern di awal abad ke-20. Hal ini menandai gejala mulai bersemainya *civil society* di Indonesia.

Hal ini bersamaan dengan tumbuhnya gagasan demokrasi di Indonesia, yang berawal dari kesadaran atas situasi diri, baik dalam arti individual, kelompok maupun masyarakat-bangsa, yang secara politik terjajah. Artinya, kesadaran terhadap ketidakadilan yang dialami akibat penindasan kolonial tidak saja merangsang lahirnya tuntutan kemerdekaan bagi bangsa, melainkan juga kebebasan bagi orang individu, dan persamaan hak bagi semua. Ini berarti bahwa tuntutan lahirnya suatu negara-bangsa dalam realitasnya bisa saling berhimpitan dengan tuntutan terbentuknya sebuah masyarakat yang demokratis.

Pada mulanya kesadaran-kesadaran tersebut tentulah bersifat individual. Ia

muncul di dalam diri satu atau beberapa orang tokoh pergerakan. Tetapi karena begituintensnya wacana yang berbeda itu disebar dan disosialisasikan, terutama melalui pertukaran pikiran di dalam surat kabar dan majalah, secara berangsur ia berubah menjadi *collective consciousness* (kesadaran kolektif) kaum pergerakan. Dalam konteks gagasan mengenai demokrasi, kesadaran pertama dan terutama yang tampak muncul pada dasawarsa-dasawarsa awal abad ke-20 adalah kesadaran mengenai keterbelakangan kondisi masyarakat bangsa sendiri yang tertindas oleh kolonialisme.

Penderitaan dan kesengsaraan di satu pihak, dan ketidakadilan, ketidakadilan serta diskriminasi di lain pihak, membentuk sikap dan cara pandang kaum pergerakan terhadap sistem koloni., sehingga muncullah misalnya tuntutan kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul, serta tuntutan-tuntutan lain yang lebih luas. Hal ini terlihat dari korespondensi Kartini bersurat dan menyampaikan penderitaan batinnya kepada keluarga Abendanon. Hal yang senada dilakukan Multatuli dengan *Max Havelaar*-nya, Dr. Rivai dengan *Tan sen Ang* dan Suwardi Surjaningrat melalui tulisannya yang amat mengusarkannya pemerintah kolonial, *Als ikeen Nederlander was*. Mereka tidak secara eksplisit mengemukakan istilah demokrasi atau bicara demokrasi sebagai kata, melainkan dalam bentuk tindakan yang bertolak dari kesadaran untuk mengubah dan mengangkat martabat bangsa sendiri dari kehinaan (Haris, 1994).

Kesadaran merupakan refleksi keprihatinan elit pergerakan atas situasi diri yang dihadapi dan mengungkungnya. Kendati demikian, perubahan dari kesadaran ke ide tidak terjadi dengan sendirinya tanpa rangsangan dan pengaruh dari luar. Pada fase awalpergerakan, ada dua faktor terpenting yang memungkinkan tumbuh dan bersemainya ide-ide di lingkungan pergerakan. *Pertama*, Politik Etis kolonial. memungkinkan sebagian kecil masyarakat pribumi mengenal diri dan lingkungan mereka serta dunia luar yang sesungguhnya. *Kedua*, kebutuhan melindungi diri dari ancaman Perang Dunia I yang kemudian mendorong terbentuknya *Committe Indie Webaar* (Panitia Ketahanan Hindia). Panitia yang diantaranya beranggotakan Budi Utomo dan Serikat Islam inilah yang kemudian menuntut diadakannya milisi dan parlemen bagi masyarakat bumi putera, walaupun – dalam konteks Politik Etis, pemerintah kolonial berniat pula mendirikan suatu *Volksraad*, yang akhirnya terwujud pada 1918. Keinginan untuk melindungi diri ini bagaimanapun merupakan suatu bentuk kesadaranyang mencerminkan begitu kuatnya keinginan kaum pergerakan mengangkat harkat dan nasib bangsa.

Dalam perjalanannya, pertumbuhan *civil society* Indonesia pernah mengalami suatu masa yang cukup menjanjikan bagi pertumbuhannya. Hal ini terjadi pada masa pasca revolusi (tahun 1950-an), pada saat organisasi sosial dan politik dibiarkan tumbuh bebas dan memperoleh dukungan kuat dari warga masyarakat yang baru saja merdeka. Tambahan pula, pada periode ini, negara yang baru lahir belum memiliki kecenderungan intervensionis, sebab kelompok elite penguasa berusaha keras untuk mempraktikkan sistem Demokrasi Parlementer. Tak pelak lagi, ia menciptakan kekuatan masyarakat yang pada saatnya akan mampu untuk menjadi penyeimbang ataupun pengawas terhadap kekuatan negara.

Iklim pertumbuhan *civil society* yang bagus di awal kemerdekaan ternyata tak berlangsung lama. Hal ini berakibat pada belum kokohnya akar *civil society* dan justru mengalami penyurutan terus menerus. Bahkan akibat krisis politik pada

level negara ditambah dengan kebangkrutan ekonomi dalam skala massif, distorsi dalam masyarakatpun meneruak. Hal ini pada gilirannya menghalangi kelanjutan perkembangan *civil society*. Organisasi massa dan lembaga sosial berubah menjadi backbone politik alirandan pertarungan berbagai ideologi. Dapat dikatakan bahwa ketika dasawarsa 1950-an berakhir dan dasawarsa 1960-an dimulai, *civil society* yang baru berkembang di negeri kita telah mengalami kemandekan bahkan kemunduran.

Kondisi *civil society* mencapai titik yang paling parah di medio sampai akhir pemerintahan Soekarno. Di bawah rezim Demokrasi Terpimpin, politik Indonesia didominasi oleh penggunaan mobilisasi massa sebagai alat legitimasi politik. Akibatnya, setiap usaha yang dilakukan oleh anggota masyarakat untuk mencapai kemandirian berisiko dicurigai sebagai kontra-revolusi. Demikian pula, menguatnya kecenderungan ideologisasi politik telah mempertajam polarisasi politik sehingga merapuhkan kohesi sosial.

Tumbangnya rezim Soekarno dan munculnya Orde Baru menunjukkan proses restrukturisasi politik, ekonomi dan sosial mendasar yang berdampak bagi perkembangan *civil society* di Indonesia. Pada dataran sosial-ekonomi akselerasi pembangunan lewat industrialisasi telah berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia juga mendorong terjadinya perubahanstruktur sosial masyarakat Indonesia yang ditandai dengan tergesernya pola-pola kehidupan masyarakat agraris. Kelas-kelas sosial baru dalam masyarakat tumbuh dan berkembang, utamanya terbentuknya kelas menengah yang ada di wilayah urban. Demikian pula dengan semakin tingginya tingkat pendidikan anggota masyarakat, maka tuntutan akan perbaikan kualitas kehidupan pun menjadi semakin tinggi.

Sejarah kelahiran Orde Baru menjadi ciri perwatakan rezim yang bekerja dan dihidupi oleh mesin kekerasan untuk mengelola hidup masyarakat. Ada tiga hal yang menjadi concern yang dikerjakan, yaitu: pertama, pengikisan seluruh kekuatan di masyarakat melalui stigmatisasi sebagai komunis terhadap kekuatan kritis masyarakat. Akibatnya muncul ketakutan di kalangan masyarakat untuk menyuarakan kritiknya. Kedua, proses deideologisasi. Seiring dengan dikembangkannya wacana ancaman pelabelan komunis, negara menjalankan praktek deideologisasi dengan menempatkan Pancasila sebagai asas tunggal. Proses ini mematahkan seluruh upaya kritis untuk mengeksplorasi lebih mendalam problem bangsa serta memberikan jalan baru bagi masa depan bangsa. Ketiga, proses depolitisasi, baik dengan atau tanpa kekerasan. Larangan, pembredelan sampai pada kekerasan fisik membuat ruang gerak pihak sipil untuk berpartisipasi politik semakin terbatas.

Otoritarianisme Orde Baru memicu munculnya gerakan pro demokrasi denganberagam jenis dan skala gerakannya. Gerakan ini sudah dimulai sejak tahun 1970 yangmenamakan dirinya gerakan Mahasiswa menggugat. Gerakan ini dapat dikategorikan sebagai gerakan koreksi. Dalam perkembangan lebih lanjut gerakan ini berubah menjadi gerakan konfrontasi pada tahun 1978 yang meminta agar Suharto tidak mencalonkan diri lagi menjadi presiden. Selain itu muncul juga, gerakan intelektual organik melalui forum demokrasi di tahun 1990, gerakan pers di tahun 1994, gerakan perempuan, serta gerakan oposisi kaum muda di dalam maupun luar kampus yang mengonsolidasikan dirinya di tahun 1998. Gerakan pro

demokrasi ini yang akhirnya memaksa Suharto untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden, sekaligus menandai tumbangnya Orde Baru (Budiman & Tornquist, 2001; Jati, et al., 2002).

Tumbangnya Orde Baru menandai dimulainya era baru, yaitu reformasi. Era inisekaligus menandai transisi demokrasi. Dalam perjalanannya selama 23 tahun gerakanreformasi, demokrasi belum mengalami kemajuan signifikan dan akhir-akhir ini cenderung mengalami kemunduran atau regresi. Kemunduran itu disebut datang dari dua arah sekaligus yakni di tingkat negara dan elite (atas) dan di level masyarakat (bawah). Kemunduran demokrasi dari level atas, menurut Priyono dan Hamid (2014) tercermin dari konsistensi kebijakan yang dinilai mengurangi kebebasan sipil (iliberal).Antara lain mobilisasi politik populisme, berkembangnya intoleransi, dan menguatnya sektarianisme. Kemudian, lembaga-lembaga pemilihan dan perwakilan juga dinilai semakin lemah fungsinya. Di sisi lain, terjadinya kemerosotan kebebasan akibat lemahnya oposisi dan pembatasan kritik.

Sementara itu, gejala regresi demokrasi dari tingkat bawah atau masyarakat disebut terjadi dengan menguatnya gerakan main hakim sendiri, vigilantisme agama dan juga bentuk diskriminasi terhadap minoritas agama, minoritas etnis, serta menerapkan pluralisme represif untuk membenarkan pembubaran organisasi massa tanpa pengadilan.

### **Degradasi Demokrasi di Era Jokowi**

Demokrasi Indonesia di era Presiden Joko Widodo terancam. Hal ini terkait dengan makin memburuknya kebebasan sipil di Indonesia dalam konteks kebebasan berpendapat dan berkumpul. Ia mencontohkan sejumlah pelanggaran untuk berkumpul atau berdemonstrasi, pembubaran paksa, pembatasan organisasi, penghalangan informasi, dan intimidasi. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh YLBHI di 16 provinsi, sepanjang tahun 2019 lalu terdapat 6.128 orang menjadi korban pelanggaran kebebasan berpendapat dan berkumpul. Data tersebut, menunjukkan pelanggaran terhadap kebebasan sipil di era Joko Widodo makin buruk (Asfinawati, 2020).

Merujuk pada Indeks Demokrasi 2019, Indonesia mendapatkan skor 6,48 dan menempati peringkat 64 dari 167 negara yang disurvei. Kategori demokrasi Indonesiamasuk dalam kategori demokrasi cacat. Kebebasan sipil di Indonesia dalam Indeks Demokrasi 2019 adalah yang terendah di antara indikator lainnya. Pada kala 10, nilai kebebasan sipil Indonesia mencapai 5,59. Sementara nilai budaya politik Indonesia mencapai 5,63 poin. Indikator-indikator lain lumayan baik: proses pemilihan danpluralisme (7,92), fungsi pemerintahan (7,14), dan partisipasi politik (6,11).

Beberapa kebijakan Jokowi, meminjam istilah Steven Levitsky dan Ziblatt (2019) ikut berkontribusi dalam penumbangan demokrasi. Hal ini bisa dilihat sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Peraturan Presiden (perpres) No. 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia (TNI). Perppu tentang ormas yang digunakan pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia, walau benar secara substansi tapi cacat secara prosedur karena mengeliminasi proses peradilan.Selain itu,

perpres jabatan TNI juga dianggap berbenturan dengan undang-undang (UU) dan semangat reformasi.

Pada era Jokowi, banyak tokoh-tokoh aktivis yang dikriminalisasi. Di antaranya seperti Veronika Koman karena tuduhan provokasi insiden asrama mahasiswa Papuadi Surabaya, Jawa Timur; lalu Dandhy Dwi Laksono atas konten tentang Papua yang dia unggah dalam akun Twitter miliknya. Aktivis Ananda Badudu juga sempat ditahankarena mendukung demonstrasi mahasiswa, Ahmad Dhani melalui cuitannya di mediasocial berakibat ia harus mendekam di penjara dan masih banyak lagi kasus lain tentang kekangan terhadap kebebasan mengemukakan pendapat. Disini terlihat lemahnya tanggung jawab dan perlindungan negara terhadap hak-hak sipil dan politik masyarakat. Kebijakan lainnya era kepemimpinan Jokowi yang telah mengikis demokrasi di Indonesia adalah keputusan Jokowi untuk mendukung pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) walau ditentang banyak pihak. Ditambah lagi, sikap aparat keamanan dalam mengamankan aksi demonstrasi di berbagai kota yang menolak revisi UU KPK dan RKUHP juga diwarnai tindakan represif anti-demokrasi.

Demokrasi di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,58 poin dari tahun 2016 menjadi 6,39 pada tahun 2017 dan 2018 dalam Indeks demokrasi<sup>3</sup> yang dikeluarkan *The Economist Intelligence Unit*. Lebih lanjut, dalam laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) merilis indeks demokrasi Indonesia 2020 mencatat skor terendah dalam 14 tahun terakhir. Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dalam Indeks Demokrasi yang dirilis EIU dengan skor 6.3. Meski dalam segi peringkat Indonesia masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, namun skor tersebut menurun dari yang sebelumnya 6.48 (Putra, 2021).

Dalam indeks tersebut Indonesia termasuk dalam kategori sebagai demokrasi cacat (*flawed democracy*). Status ini artinya Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum yang relatif bebas dan adil dan menghormati kebebasan sipil dasar, namun memiliki beberapa persoalan seperti pelanggaran kebebasan media serta persoalan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2018, Indonesia juga mengalami penurunan pada indeks aspek kebebasan sipil sebesar 0,29 poin, dan pada aspek hak-hak politik turun sebesar 0,84 poin dibandingkan tahun 2017.

Demokrasi memang merupakan suatu sistem yang terus bergerak; ia dinamis dan tidak selalu linear dalam menuju demokrasi yang substantif. Karena itu, demokrasi sangat bergantung pada aktor-aktor demokrasi: mulai dari aktor pemerintahan hingga masyarakat sipil. Lembaga demokrasi semestinya diisi oleh kaum demokrat. Akan tetapi realitanya, mengutip Fajrul Rahman (2007) dapat diasosiasikan bahwa demokrasikita saat ini berjalan tanpa kaum demokrat. Lebih lanjut praktik distortif demokrasi pasca reformasi ini mestilah diakhiri. Para pemain di panggung politik tidak boleh dibuat nyaman dengan kondisi penggerogotan rasionalitas demokrasi, kerancuan politik, dan kecerobohan yang berbuntut pada dibajaknya demokrasi oleh kekuatan antidemokrasi.

### **Revitalisasi Peran Masyarakat Sipil**

Elemen dari *civil Society* sejatinya memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai penopang bagi terwujudnya pemerintahan demokratis. Secara historis,

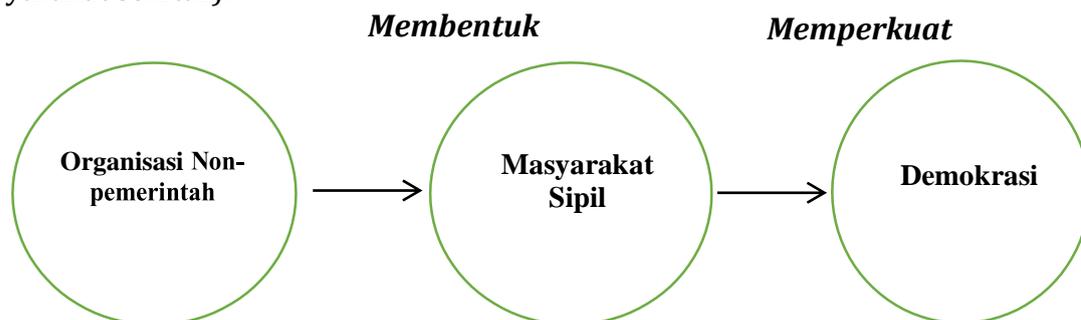
sebagian dari mereka telah memiliki akar kesejarahan cukup lama dan para pemimpinnya telah berperan banyak di dalam meretas kesadaran politik baru di dalam masyarakat.

Masalah yang mendesak saat ini dan di masa datang adalah bagaimana mengembangkan potensi itu melalui wacana dan strategi-strategi pemberdayaan serta program-program aksi yang tepat. Saat ini wacana supremasi sipil tak pelak lagi sudah berkembang pesat dan menyebar di berbagai kalangan masyarakat bahkan di kalangan pemerintah (Ibrahim, 2002). Oleh sebab itu, langkah selanjutnya adalah menindaklanjuti wacana dengan program-program aksi sehingga gerakan pro- demokrasi akan semakin substantif karena memiliki akar yang kuat dalam *civil society*.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sebagai salah satu elemen penting dalam *civil society* ikut memikul tanggungjawab dalam perbedaannya. Karena itu, LSM di Indonesia sudah sepatutnya berada di barisan depan dalam program-program aksi pemberdayaan, termasuk di dalam menciptakan *linkage* gerakan pro-demokrasi di negeri ini yang masih belum terwujud secara nyata. Untuk mencapai tujuan tersebut LSM perlu melakukan self-refleksi terhadap keberadaannya sebagai aktor, selanjutnyamereka mempunyai komitmen terhadap pemberdayaan *civil society* dan sampai di manakomitmen tersebut diwujudkan dalam program-program kongkrit mereka.

Selain itu, penting dan perlu sekali dibangun semacam asosiasi sipil (ornop) sebanyak-banyaknya, yang tujuannya untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Di samping itu, melalui dan di dalam ornop, setiap anggota dapat belajar berdemokrasi, karena salah satu aktivitas utamanya adalah berdiskusi dalam rangka mempercakapkanberbagai hal yang terkait dengan perjuangan mereka. Dengan kata lain Ornop dapat mengembangkan literasi politik (Heryanto, 2019). Itulah sebabnya ornop dianggap sebagai “sekolah demokrasi” bagi rakyat—maka belajar berdemokrasi bukan saja lewat buku-buku dan bukan pula hanya di lembaga sekolah.

Namun demikian, demi kemajuan para anggota ornop itu sendiri, maka setiap ornop sangat penting untuk terus-menerus memperhatikan hal-hal yang berkait dengan tata organisasi seperti manajemen personalia, manajemen keuangan, perencanaan evaluasi, deskripsikerja, peraturan kerja, hierarki jabatan, struktur organisasi, pengembangan wawasan dan ketrampilan, dan lainnya. Memang sebuah ornop tak selalu perlu didasari oleh sebuah akta notaris (legitimasi hukum), tetapi bukan berarti mengabaikan profesionalitas. Karena, hal inilah yang sesungguhnya memperkuat legitimasi ornop tersebut, yakni legitimasi sosial (diakui manfaatnya dan diterima keberadaannya oleh para anggota serta masyarakat sekitar).



### Gambar 1. Revitalisasi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi

Perjuangan untuk pemulihan dan revitalisasi *civil society* sebagai suatu prakondisi demokrasi di Indonesia merupakan suatu proses yang panjang dan terbuka. Dalam hubungan dialektika antara negara dan masyarakat secara pasti menempati suatu posisi yang menentukan. Sejauh masyarakat tetap tidak mampu melampaui pengawasan dominasi negara dan menjadi lebih mandiri, maka prospek pemulihan *civil society* akan selalu suram, dan atas dasar itu, proyek demokratisasi akan sulit. Dalam konteks ini maka masyarakat sipil perlulah melakukan refleksi untuk memperjelas posisinya dan meneguhkan kembali visi dan misinya dalam mewujudkan cita-cita demokrasi (Raharjo, 1995).

Saat ini, hubungan negara dan masyarakat di Indonesia cenderung asimetris. Selain itu, berlanjutnya negara birokratis-otoriter akan membuka kemunculan suatu struktur politik oligarkis. Sebagai akibatnya, inti dari suatu demokrasi partisipatoris akan semakin jauh darinya. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan politik masyarakat arus bawah harus diarahkan menuju revitalisasi kesadaran dan pengembangan kemandirian politik masyarakat yang merupakan ciri dari model pendekatan *civil society*. Dalam konteks saat ini sudah saatnya *civil society* bekerja sebagai jawaban sistem kapitalisme global (Lay, 2004). Relevansinya dengan hiruk pikuk politik kontemporer adalah bagaimana *civil society* berkonsolidasi untuk mengahadangi oligarki dan penetrasinya dalam kehidupan politik.

Dengan demikian, pemberdayaan politik arus bawah harus mendorong transformasi sosial di mana agen diberikan peranan utama. Dengan memberikan keunggulan pada agen, pemberdayaan dapat berakar secara kuat, karena ini mencakup pemahaman para aktor atas realitas dan pengalaman-pengalaman mereka di dalamnya. Pada saat yang bersamaan, ini membuka kemungkinan, baik dialog maupun refleksi kritis, yang berkaitan dengan kapabilitas mereka dalam meluaskan pemahaman-diri mereka ke jangkauan politik yang lebih luas.

Proses pemberdayaan politik membutuhkan apa yang disebut Habermas (1984) sebagai kemampuan komunikasi para aktor. Dengan ini, keberadaan ruang publik yang bebas untuk menjamin kemungkinan diskursus yang tidak terdistorsi sangat diperlukan. Karenanya, kemampuan ini secara tidak langsung menunjukkan hubungan sosial yang nonrepresif yang memungkinkan para aktor untuk menjalankan diskursus politik bebas dari berbagai tekanan, baik psikologis maupun fisik. Dengan demikian, pemberdayaan politik arus bawah dalam dirinya menyumbang terhadap keterbukaan dan perluasan ruang publik.

Gerakan demokrasi di Indonesia perlu mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam rangka mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat arus bawah. Melalui penyesuaian kreatif, gerakan demokrasi dapat mengembangkan strategi dan pendekatan pemberdayaan mereka sendiri. Satu tugas yang paling mendesak adalah mengembangkan pendekatan humanis untuk menarik dukungan masyarakat melalui pemecahan isu sosial dasar, misalnya pemberdayaan serikat buruh yang ada, membangun struktur yang memadai bagi demokratisasi masyarakat, mempertahankan dan memperbesar ruang publik yang memadai, dan sebagainya. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan ini seluruhnya akan

menghindari tindakan politik seperti terlibat di dalam protes massa, pemogokan dan tindakan pembangkangan sipil lainnya.

### **Kesimpulan**

Demokratisasi merupakan sebuah proses yang *multifaceted* karena melibatkan banyak sekali faktor, baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, bahkan historis, di samping faktor politik. Oleh karena itu, LSM dan elemen masyarakat sipil tidak dapat memfungsikan harus senantiasa memperhatikan dan mengkapitalisasikan sejumlah faktor tersebut menjadi sebuah dukungan.

Keberhasilan proses demokratisasi akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh masyarakat menjunjung nilai-nilai penopang demokrasi itu sendiri. Demokrasi baru dapat berfungsi dengan baik apabila ditopang oleh sistem nilai yang ada. Idealisasi ini akan berhadapan dengan tantangan struktur social budaya dalam masyarakat yang sangat hierarkis dan konteks hubungan sosial yang diwarnai oleh *patronage*. Oleh karena itu proses demokratisasi memerlukan usaha serius dan strategi budaya yang sesuai untuk meminimalisir benturan dengan struktur kekuasaan yang ditopang oleh tataran yang dominan. Merujuk pada terminology Arbi Sanit (1998) perlunya agenda reformasi budaya politik menuju demokrasi.

Keberagaman masyarakat Indonesia merupakan campuran semua elemen sosial, budaya dengan heterogenitas yang tinggi serta pemahaman yang beragam tentang pentingnya demokrasi, akan menjadi tantangan tersendiri dalam proses demokratisasi. Berbicara tentang demokrasi dengan kalangan masyarakat elite, kaum intelektual, kelompok kelas menengah, kalangan akan lebih mudah. Akan tetapi kesulitan akan muncul ketika berhadapan dengan kelompok masyarakat kecil, yang merupakan sebagian besar penduduk Indonesia. Oleh karena itu perlunya masyarakat sipil merumuskan strategi adaptasi dan penyesuaian kreatif dalam sosialisasi demokrasi kepada masyarakat.

### **Referensi**

- Budiman, A. & Tornquist, O. (2001). *Aktor Demokrasi: Catatan Tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia. (Democratic Actors: Notes on the Resistance Movement in Indonesia)*. Jakarta: ISAI.
- Diamond, L. (1994). Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation. *Journal of Democracy* 5 (3), 4-17. <https://doi.org/10.1353/jod.1994.0041>.
- Habermas, J. (1984). *Theory of Communicative Action, Volume One: Reason and the Rationalization of Society*, (Diterjemahkan oleh Thomas A. McCarthy). Boston, Massachuset: Beacon Press.
- Haris, S. (1994). *Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman*. Jakarta: LP3ES.
- Heryanto, G. G. (2019). *Literasi Politik: Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*. Yogyakarta: IRCISOD.
- Huntington, S. (1991). *The Third Wave: Democratisation in Late Twentieth Century*. Norman: The University of Oklahoma Press.
- Ibrahim, R. (2002). Neraca Reformasi Akhir Tahun 2001 dan Agenda Civil Society. Hiqmah, Nor (editor). *Indonesia Menapak Demokrasi*. Jakarta: YAPPIKA.

- Jati, R. W. Et al. (2002). *Jalan Panjang Menuju Demokrasi: Buku Foto Gerakan Masyarakat Sipil di Indonesia, 196-2001 (The Long Road to Democracy: A Photographic Journey of The Civil Society Movement in Indonesia, 1965- 2001)*. Jakarta, Indonesia: Yappika.
- Lay, C. (2001), *Presiden, Civil Society, dan HAM*. Jakarta: Pensil-324.
- Levitsky, S. & Ziblatt, D. (2019). *Bagaimana Demokrasi Mati: Apa yang Diungkapkan Sejarah tentang Masa Depan Kita*. Jakarta: KPG.
- Madjid, N. (1999). Pengantar (2) Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan,” dalam Ahmad Baso, *Civil Society versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran “Civil Society” dalam Islam Indonesia*. Bandung: Pustaka Hidayah
- Priyono, A. E. & Hamid, U. (2014). *Merancang Arah baru Demokrasi: Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: KPG.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Putra, R. A. (2021). Indeks Demokrasi Indonesia Catat Skor Terendah dalam Sejarah. <https://www.dw.com/id/indeks-demokrasi-indonesia-catat-skor-terendah-dalam-sejarah/a-56448378>. Diakses 5 Agustus 2021 pukul 21.00 WIB.
- Raharjo, M. D. (1995). Kelas Menengah, Masyarakat Sipil, dan LSM. dalam Saidi, Zaim. *Secangkir Koi Max Havelaar: LSM dan Kebangkitan Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Rahman, F. (2007), *Demokrasi tanpa Kaum Demokrat: Tentang kebebasan, Demokrasi, dan Negara Kesejahteraan*. Depok: Penerbit Koekoesan.
- Sanit, A. (1998). *Reformasi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.